

Pemulihan Ekonomi yang Berkeadilan: Menempatkan Kesejahteraan Rakyat sebagai Tujuan Utama

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyc.com/cv.pdf

IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

2026



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudycct.com/cv.pdf



IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)



ARTIKEL AKADEMIK

Pemulihan Ekonomi yang Berkeadilan: Menempatkan Kesejahteraan Rakyat sebagai Tujuan Utama

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk Indonesia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.



Kesejahteraan Rakyat



Pekerjaan Layak



UMKM & Ekonomi Lokal



Perlindungan Sosial



Pemerataan Pembangunan



Pendidikan, Kesehatan & Daya Beli



“Pertumbuhan untuk semua, keadilan untuk bangsa, kemakmuran untuk generasi mendatang.”



Berkelanjutan



Berkeadilan



Inklusif



Inovatif

Abstrak

Pemulihan ekonomi yang berkeadilan menuntut perubahan orientasi kebijakan dari sekadar memulihkan pertumbuhan produk domestik bruto menuju pemulihan kemampuan nyata warga untuk hidup sehat, produktif, aman, bermartabat, dan memiliki peluang yang setara. Artikel ini membahas pemulihan ekonomi Indonesia dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, sementara pertumbuhan, stabilitas makroekonomi, investasi, produktivitas, digitalisasi, dan disiplin fiskal diperlakukan sebagai sarana. Dengan memadukan perspektif ekonomi pembangunan, capability approach, pertumbuhan inklusif, decent work, perlindungan sosial adaptif, ekonomi lokal, transformasi digital, serta pembangunan hijau, artikel ini mengusulkan arsitektur kebijakan yang menghubungkan penciptaan pekerjaan berkualitas, penguatan daya beli, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, reformasi perpajakan, pembangunan wilayah, dan tata kelola publik. Data resmi terkini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan indikator kemiskinan serta pengangguran membaik, namun kualitas pekerjaan, kerentanan rumah tangga, ketimpangan akses, dan disparitas wilayah masih menuntut perhatian. Karena itu, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari laju pertumbuhan, tetapi perlu dinilai dengan dashboard kesejahteraan yang mencakup pendapatan riil, pekerjaan layak, kemiskinan multidimensi, mobilitas sosial, kualitas layanan publik, ketahanan rumah tangga, serta keberlanjutan ekologis. Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa keadilan bukan biaya tambahan bagi pemulihan ekonomi, melainkan prasyarat bagi pemulihan yang tahan lama, produktif, legitimate, dan mampu memperkuat kohesi sosial.

Kata Kunci: pemulihan ekonomi; kesejahteraan rakyat; keadilan sosial; pertumbuhan inklusif; pekerjaan layak; perlindungan sosial; kebijakan fiskal; UMKM; transformasi digital; pembangunan berkelanjutan

Pokok Argumen: Pemulihan ekonomi harus dinilai dari kemampuan pertumbuhan, kebijakan fiskal, investasi, teknologi, dan transformasi struktural dalam meningkatkan kesejahteraan, pekerjaan layak, daya beli, ketahanan rumah tangga, serta keadilan antarkelompok dan antarwilayah.

1. Pendahuluan: Pemulihan Ekonomi untuk Siapa?

Istilah pemulihan ekonomi sering digunakan setelah suatu perekonomian mengalami tekanan: resesi, krisis kesehatan, guncangan harga pangan dan energi, perlambatan global, bencana alam, konflik geopolitik, atau disrupsi teknologi. Dalam bahasa kebijakan, pemulihan biasanya digambarkan melalui kembali meningkatnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), membaiknya investasi, pulihnya ekspor, menurunnya inflasi, atau meningkatnya penerimaan negara. Indikator tersebut penting karena memberi gambaran mengenai kapasitas produksi dan stabilitas makroekonomi. Namun, indikator agregat tidak selalu menjawab pertanyaan yang paling mendasar: apakah masyarakat benar-benar hidup lebih baik setelah ekonomi pulih? Apakah pekerja memperoleh pekerjaan yang lebih aman dan produktif? Apakah keluarga memiliki daya beli yang cukup untuk pangan bergizi, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan konektivitas digital? Apakah manfaat pertumbuhan menjangkau desa, wilayah kepulauan, daerah tertinggal, pekerja informal, perempuan, penyandang disabilitas, serta generasi muda? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengubah pembahasan pemulihan ekonomi dari persoalan teknis menjadi persoalan keadilan.

Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan, tetapi statusnya adalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan manusia. Perekonomian yang tumbuh lima persen tetapi menghasilkan pekerjaan berupah rendah, rentan, tanpa perlindungan sosial, dan dengan akses layanan dasar yang timpang tentu berbeda kualitasnya dari perekonomian dengan laju pertumbuhan yang sama tetapi mampu menciptakan pekerjaan produktif, memperkuat mobilitas sosial, dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, istilah "pemulihan yang berkeadilan" menekankan distribusi hasil, distribusi kesempatan, distribusi risiko, dan distribusi suara dalam proses pembangunan. Keadilan bukan hanya mengenai siapa menerima bantuan setelah krisis, melainkan mengenai bagaimana struktur ekonomi dirancang agar risiko tidak terus-menerus dipindahkan kepada kelompok yang paling lemah.

Konteks Indonesia pada 2026 memberikan dasar yang penting untuk diskusi ini. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan dan pertumbuhan semester I 2026 sebesar 5,45 persen. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 4,65 persen, sedangkan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai sebesar Rp3,39 juta per bulan. Angka-angka ini menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi, tetapi juga mengingatkan bahwa keberhasilan agregat harus diterjemahkan menjadi ketahanan ekonomi rumah tangga dan kualitas hidup. Ketika garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan, persoalan pentingnya bukan hanya berapa orang yang berada di bawah garis tersebut, tetapi juga seberapa banyak rumah tangga berada sedikit di atasnya dan masih rentan jatuh kembali akibat sakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, kenaikan biaya sekolah, atau lonjakan harga pangan.

Artikel ini berangkat dari tesis bahwa pemulihan ekonomi yang benar-benar kuat harus bersifat *people-centered*. Pemerintah perlu menjaga stabilitas makro, investasi, dan daya saing, tetapi seluruh instrumen tersebut harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan. Dengan orientasi seperti ini, kebijakan fiskal, investasi publik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM, teknologi digital, dan transisi hijau tidak berdiri sendiri. Semuanya harus dirangkai dalam satu arsitektur pemulihan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan keadilan sebagai prinsip desain. Dalam perspektif demikian, pemulihan ekonomi bukan sekadar kembali ke keadaan sebelum krisis, melainkan menggunakan momentum pemulihan untuk memperbaiki struktur yang sebelumnya telah menghasilkan kerentanan, ketimpangan, dan eksklusi.

2. Kesejahteraan sebagai Tujuan: Dari PDB ke Kapabilitas Manusia

Selama puluhan tahun PDB menjadi indikator dominan dalam menilai keberhasilan ekonomi. PDB sangat berguna untuk mengukur nilai produksi barang dan jasa, tetapi tidak dirancang untuk mengukur seluruh dimensi kesejahteraan. Kenaikan PDB tidak otomatis menunjukkan apakah pendapatan terdistribusi secara adil, apakah kualitas lingkungan membaik, apakah waktu kerja semakin manusiawi, apakah warga merasa aman, atau apakah akses pendidikan dan kesehatan semakin setara. Kritik terhadap ketergantungan berlebihan pada PDB diperkuat oleh laporan *Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress* yang dipimpin Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi. Pesan intinya adalah bahwa pengukuran kemajuan harus bergeser dari sekadar produksi menuju kesejahteraan masyarakat, distribusi, kualitas hidup, dan keberlanjutan.

Capability approach Amartya Sen memberikan landasan filosofis yang kuat. Kesejahteraan tidak cukup dipahami sebagai banyaknya komoditas yang dimiliki seseorang, tetapi sebagai kemampuan nyata untuk melakukan dan menjadi sesuatu yang bernilai: sehat, terdidik, bekerja secara bermartabat, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, memiliki keamanan, serta mampu membuat pilihan hidup. Dua keluarga dengan pendapatan sama dapat memiliki kapabilitas yang sangat berbeda jika satu keluarga tinggal dekat sekolah dan rumah sakit, sedangkan keluarga lain harus mengeluarkan biaya transportasi besar dan menghadapi layanan yang terbatas. Karena itu, kebijakan pemulihan harus memperhatikan konversi sumber daya menjadi peluang nyata, bukan berhenti pada distribusi uang.

Kesejahteraan juga memiliki dimensi objektif dan subjektif. Dimensi objektif meliputi pendapatan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, akses air bersih, sanitasi, konektivitas, keamanan, dan kualitas lingkungan. Dimensi subjektif menyangkut rasa aman, kepuasan hidup, kepercayaan terhadap institusi, harapan terhadap masa depan, dan persepsi mengenai keadilan. Dalam ekonomi yang mengalami perubahan cepat akibat otomatisasi, platform digital, perubahan iklim, dan volatilitas global, rasa aman menjadi komponen kesejahteraan yang semakin penting. Masyarakat dapat mengalami pertumbuhan pendapatan sekaligus meningkatnya kecemasan apabila pekerjaan makin tidak pasti atau biaya layanan dasar meningkat lebih cepat dari penghasilan.

Bagi Indonesia, pendekatan kesejahteraan berarti bahwa kebijakan nasional harus peka terhadap keragaman geografis dan sosial. Biaya hidup di Jakarta berbeda dari kabupaten kepulauan; akses internet di pusat kota berbeda dari desa terpencil; risiko petani berbeda dari pekerja platform; dan kebutuhan kelompok lansia berbeda dari generasi muda. Dengan demikian, kebijakan universal perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang terarah. Hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan esensial, dan perlindungan terhadap risiko ekstrem perlu dijamin luas, sementara dukungan tambahan harus diarahkan kepada kelompok dan wilayah dengan kerentanan yang lebih tinggi. Di sini keadilan tidak selalu berarti memberikan jumlah yang sama kepada semua orang, melainkan memberikan dukungan sesuai kebutuhan agar kesempatan menjadi lebih setara.

3. Makna Keadilan dalam Pemulihan Ekonomi

Keadilan ekonomi dapat dilihat sekurang-kurangnya dari empat dimensi. Pertama, keadilan distribusi, yaitu bagaimana pendapatan, aset, layanan publik, dan manfaat kebijakan terbagi di masyarakat. Kedua, keadilan kesempatan, yaitu apakah setiap orang memiliki akses yang wajar terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan, modal, teknologi, pekerjaan, dan pasar. Ketiga, keadilan prosedural, yakni apakah proses perumusan kebijakan transparan, partisipatif, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak didominasi oleh kelompok dengan kekuatan ekonomi atau politik yang lebih besar. Keempat, keadilan antar-generasi, yaitu apakah kemakmuran hari ini dibangun tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup, sumber daya, ruang fiskal, dan kualitas institusi yang memadai.

Empat dimensi ini penting karena kebijakan pemulihan sering melibatkan trade-off. Subsidi energi, misalnya, dapat membantu menjaga daya beli jangka pendek tetapi bila tidak tepat sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal, mendorong konsumsi energi fosil, dan lebih banyak dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan atau konsumsi energi lebih tinggi. Sebaliknya, pengurangan subsidi tanpa kompensasi yang memadai dapat membebani rumah tangga berpendapatan rendah. Keadilan menuntut desain transisi: bantuan tunai atau sosial yang tepat waktu, peningkatan transportasi publik,

perlindungan pekerja sektor terdampak, dan investasi energi bersih. Dengan kata lain, tujuan kebijakan tidak boleh dinilai terpisah dari siapa yang membayar biaya penyesuaian.

Keadilan juga berkaitan dengan predistribution atau pembagian manfaat sejak proses penciptaan nilai, bukan hanya redistribution setelah ketimpangan terjadi. Jika pekerja memiliki produktivitas yang meningkat tetapi bagian upah dalam nilai tambah tidak membaik, negara kemudian dipaksa mengoreksi ketimpangan melalui pajak dan transfer. Koreksi tersebut tetap penting, namun akan lebih efektif apabila struktur pasar tenaga kerja, tata kelola perusahaan, pendidikan, akses modal, dan kebijakan persaingan memungkinkan masyarakat memperoleh bagian yang adil sejak awal. Pendekatan ini menggeser diskusi dari "berapa besar bantuan" menjadi "bagaimana ekonomi menghasilkan kesejahteraan secara lebih adil sejak proses produksi".

Dalam praktik, pemulihan yang berkeadilan berarti memprioritaskan kelompok yang paling rentan terhadap guncangan tanpa menutup peluang bagi pertumbuhan produktif. Rumah tangga miskin memerlukan perlindungan pendapatan; kelompok rentan membutuhkan instrumen pencegah jatuh miskin; kelas menengah memerlukan layanan publik berkualitas agar tidak terus menanggung biaya privat yang mahal; UMKM memerlukan pembiayaan, pasar, teknologi, dan kepastian usaha; sedangkan perusahaan besar memerlukan iklim investasi dan infrastruktur yang andal. Tantangannya adalah menyusun kebijakan yang menghubungkan kepentingan tersebut dalam kontrak sosial yang saling menguatkan, bukan mempertentangkannya secara sederhana.

4. Membaca Kondisi Indonesia: Pertumbuhan yang Perlu Diterjemahkan menjadi Kesejahteraan

Perekonomian Indonesia memasuki 2026 dengan ketahanan yang relatif baik. Pertumbuhan 2025 mencapai 5,11 persen, kemudian menguat pada semester I 2026. Konsumsi domestik, aktivitas jasa, dan belanja pemerintah tetap memainkan peran penting. Di tengah ketidakpastian global, kemampuan mempertahankan pertumbuhan di atas lima persen menunjukkan kapasitas ekonomi yang besar. Namun kualitas pemulihan harus dilihat pada lapisan yang lebih dalam. Struktur ekonomi Indonesia masih ditandai oleh besarnya pekerjaan informal, kesenjangan produktivitas antarsektor, ketimpangan wilayah, dan kerentanan terhadap harga pangan serta energi. Artinya, pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin bahwa seluruh kelompok memperoleh perlindungan dan peluang yang sama.

Penurunan kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 merupakan perkembangan penting. Akan tetapi, angka kemiskinan bersifat garis batas. Rumah tangga yang pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan belum tentu memiliki ketahanan. Mereka dapat dengan mudah jatuh miskin ketika menghadapi guncangan. Karena itu, strategi kesejahteraan memerlukan fokus ganda: mengurangi kemiskinan kronis sekaligus memperkecil kerentanan. Pengukuran sebaiknya memasukkan kemiskinan multidimensi, akses layanan, kualitas pekerjaan, kepemilikan aset produktif, tabungan darurat, perlindungan sosial, dan kerentanan terhadap bencana atau perubahan iklim.

Pasar kerja memberi gambaran serupa. Tingkat pengangguran terbuka nasional pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen dan rata-rata upah pekerja Rp3,39 juta per bulan. Penurunan pengangguran adalah sinyal positif, tetapi angka pengangguran tidak menangkap sepenuhnya underemployment, pekerjaan tidak tetap, mismatch keterampilan, rendahnya produktivitas, atau absennya jaminan sosial. Seseorang secara statistik dapat dikategorikan bekerja meskipun hanya memiliki jam kerja terbatas atau

pendapatan yang tidak mencukupi. Karena itu, kebijakan perlu berpindah dari sekadar penciptaan jumlah pekerjaan menuju penciptaan pekerjaan berkualitas.

Dimensi fiskal juga menentukan. Hingga akhir Juni 2026, Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara sekitar Rp1.459,4 triliun dan belanja negara sekitar Rp1.656,0 triliun. Ruang fiskal harus dijaga agar pemerintah mampu merespons guncangan, tetapi kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran defisit. Belanja yang meningkatkan kesehatan, pendidikan, konektivitas, transportasi publik, produktivitas UMKM, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan memiliki efek kesejahteraan yang berbeda dari belanja yang tidak memiliki dampak jangka panjang. Karena itu, disiplin fiskal dan keadilan sosial bukan dua kutub yang harus dipertentangkan; keduanya harus disatukan melalui *spending better*, prioritas berbasis hasil, dan evaluasi dampak distribusional.

5. Pekerjaan Layak sebagai Jembatan Utama antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Bagi sebagian besar rumah tangga, pekerjaan adalah jalur utama untuk memperoleh pendapatan, martabat, identitas sosial, jaringan, dan harapan masa depan. Karena itu, pemulihan ekonomi yang tidak menghasilkan pekerjaan layak akan mudah kehilangan legitimasi. Konsep *decent work* yang dikembangkan International Labour Organization menekankan kesempatan kerja produktif, hak di tempat kerja, perlindungan sosial, dan dialog sosial. Empat unsur tersebut sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki tenaga kerja besar, keragaman keterampilan, dan porsi pekerja informal yang tinggi.

Kebijakan penciptaan kerja perlu memperhatikan struktur permintaan tenaga kerja. Industri manufaktur berorientasi ekspor, hilirisasi, pariwisata, pertanian modern, ekonomi kreatif, konstruksi hijau, layanan kesehatan, logistik, serta ekonomi digital dapat menjadi sumber lapangan kerja. Namun insentif investasi sebaiknya tidak hanya dinilai dari nilai modal yang masuk, melainkan juga dari kualitas pekerjaan yang diciptakan, produktivitas, transfer keterampilan, keterkaitan dengan pemasok lokal, dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan. Dengan pendekatan ini, investasi asing dan domestik tidak berhenti menjadi angka pembentukan modal, tetapi menjadi instrumen peningkatan kapasitas manusia dan ekonomi lokal.

Pemulihan juga membutuhkan kebijakan *active labour market*: pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan industri, layanan penempatan kerja, informasi pasar kerja, *apprenticeship* berkualitas, sertifikasi keterampilan, serta bantuan mobilitas. Banyak program pelatihan gagal ketika kurikulum tidak terhubung dengan lowongan nyata atau ketika peserta tidak memperoleh dukungan untuk memasuki pasar kerja. Model yang lebih efektif menggabungkan pemerintah, asosiasi industri, perguruan tinggi, sekolah vokasi, pemerintah daerah, dan platform penempatan kerja. Kualitas pelatihan perlu dievaluasi berdasarkan *outcome*: tingkat penempatan, peningkatan upah, retensi pekerjaan, dan mobilitas karier, bukan hanya jumlah peserta.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada pekerja platform dan pekerja ekonomi gig. Digitalisasi menciptakan fleksibilitas dan kesempatan, tetapi juga memindahkan risiko kepada individu jika tidak diikuti perlindungan. Pengemudi, kurir, *freelancer* digital, dan pekerja *on-demand* membutuhkan mekanisme yang jelas mengenai keselamatan kerja, transparansi algoritma, penyelesaian sengketa, kontribusi jaminan sosial, dan perlindungan pendapatan minimum. Regulasi tidak seharusnya mematikan inovasi, tetapi mengoreksi asimetri kekuatan antara platform dan pekerja. Prinsipnya

sederhana: teknologi boleh mengubah bentuk kerja, tetapi tidak boleh menghapus martabat dan hak dasar pekerja.

6. Daya Beli, Harga Pangan, dan Keamanan Ekonomi Rumah Tangga

Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan nominal, melainkan oleh daya beli. Ketika harga pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, atau kesehatan meningkat lebih cepat daripada penghasilan, rumah tangga mengalami penurunan kesejahteraan meskipun pendapatan nominal naik. Bagi kelompok berpendapatan rendah, porsi pengeluaran untuk pangan biasanya lebih besar sehingga inflasi pangan memiliki dampak yang lebih berat. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga pangan merupakan bagian dari kebijakan keadilan, bukan hanya kebijakan makroekonomi.

Stabilisasi harga harus menghindari pendekatan yang semata-mata mengendalikan harga di tingkat konsumen tanpa memperhatikan produsen. Harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani dan melemahkan insentif produksi. Solusinya adalah memperbaiki rantai pasok: logistik, penyimpanan dingin, gudang, informasi harga, pembiayaan, asuransi pertanian, irigasi, penguatan koperasi, serta pengurangan kehilangan pascapanen. Teknologi digital dapat digunakan untuk menghubungkan petani dengan pasar, tetapi harus disertai transparansi dan kemampuan tawar agar platform tidak menjadi perantara baru yang menyerap rente berlebihan.

Ketahanan rumah tangga juga dipengaruhi oleh kemampuan menghadapi pengeluaran tak terduga. Sakit, kehilangan pekerjaan, bencana, atau kerusakan aset dapat menghapus tabungan yang dibangun bertahun-tahun. Karena itu, pemulihan yang berkeadilan memerlukan kombinasi pendapatan kerja yang memadai, asuransi sosial, bantuan sosial, akses kredit yang bertanggung jawab, serta literasi keuangan. Kebijakan harus mencegah rumah tangga terperangkap pada pinjaman berbiaya tinggi ketika mengalami krisis. Penguatan perlindungan konsumen pada layanan keuangan digital dan pinjaman daring menjadi semakin penting.

Dalam konteks ini, "daya beli" sebaiknya tidak direduksi menjadi konsumsi sesaat. Kesejahteraan yang berkelanjutan memerlukan kemampuan rumah tangga untuk menabung, berinvestasi pada pendidikan anak, memperbaiki rumah, memiliki akses digital, dan membangun aset produktif. Karena itu, indikator pemulihan perlu memperhatikan pendapatan riil, rasio beban biaya perumahan, pengeluaran pendidikan dan kesehatan, kepemilikan tabungan, serta kemampuan menghadapi pengeluaran darurat. Pendekatan ini membuat kebijakan lebih dekat pada pengalaman nyata masyarakat.

7. Perlindungan Sosial Adaptif: Dari Jaring Pengaman ke Sistem Ketahanan

Perlindungan sosial sering dipersepsikan sebagai belanja konsumtif. Pandangan tersebut terlalu sempit. Perlindungan sosial yang dirancang dengan baik merupakan investasi pada stabilitas, kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan kohesi sosial. Ketika rumah tangga memiliki perlindungan minimum, mereka tidak perlu menjual aset produktif, menghentikan sekolah anak, atau mengurangi konsumsi gizi secara ekstrem ketika terkena guncangan. Dengan kata lain, perlindungan sosial mencegah kerugian jangka panjang akibat shock jangka pendek.

Indonesia memerlukan sistem perlindungan sosial adaptif yang mampu merespons perubahan kondisi dengan cepat. Sistem ini harus memiliki data sosial-ekonomi yang akurat, interoperabilitas antarinstansi, mekanisme pemutakhiran, serta kanal pembayaran yang inklusif. Dalam bencana atau

krisis ekonomi, kecepatan sering sama pentingnya dengan jumlah bantuan. Bantuan yang datang terlambat dapat membuat rumah tangga mengambil keputusan yang merugikan masa depan. Oleh karena itu, administrasi publik, identitas digital, rekening atau kanal pembayaran, dan mekanisme pengaduan merupakan bagian integral dari kebijakan kesejahteraan.

Perlindungan sosial juga perlu mencakup pekerja informal. Skema yang sepenuhnya bergantung pada hubungan kerja formal akan meninggalkan banyak pekerja. Diperlukan desain kontribusi yang fleksibel, subsidi iuran bagi kelompok berpendapatan rendah, portabilitas manfaat, serta integrasi antara jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, dan perlindungan kehilangan penghasilan. Untuk pekerja platform, mekanisme kontribusi dapat melibatkan pekerja, platform, dan negara berdasarkan prinsip berbagi tanggung jawab.

Kunci lainnya adalah graduation strategy. Bantuan sosial bukan tujuan permanen bagi mereka yang mampu berkembang. Penerima yang siap harus mendapatkan jalur menuju pekerjaan, usaha produktif, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar. Namun graduation tidak boleh dilakukan secara administratif semata ketika pendapatan sedikit melewati ambang. Transisi harus mempertimbangkan stabilitas pendapatan, aset, kesehatan, dan risiko. Dengan demikian, sistem perlindungan sosial menjadi "trampolin" menuju kemandirian tanpa kehilangan fungsi sebagai jaring pengaman.

8. Kebijakan Fiskal yang Berkeadilan dan Produktif

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen paling kuat untuk menghubungkan pertumbuhan dengan kesejahteraan. Di sisi penerimaan, pajak menentukan siapa yang menanggung beban pembiayaan negara. Di sisi belanja, APBN menentukan prioritas sosial dan ekonomi. Di sisi pembiayaan, pemerintah memutuskan bagaimana beban hari ini dibagi dengan generasi mendatang. Karena itu, keadilan fiskal memiliki tiga dimensi: progresivitas penerimaan, kualitas dan ketepatan sasaran belanja, serta keberlanjutan utang.

Penerimaan yang adil memerlukan basis pajak yang luas, kepatuhan tinggi, administrasi efisien, dan pengurangan ruang penghindaran pajak. Prinsipnya bukan sekadar menaikkan tarif, tetapi memastikan kemampuan membayar tercermin dalam kontribusi. Ekonomi digital, aset finansial, transaksi lintas batas, dan sektor-sektor dengan rente ekonomi tinggi memerlukan sistem perpajakan yang mampu mengikuti perubahan model bisnis. Pada saat yang sama, UMKM yang masih berada pada fase bertumbuh memerlukan kepastian dan administrasi sederhana agar formalisasi tidak dipersepsikan sebagai hukuman.

Di sisi belanja, konsep spending better sangat penting. Program harus dinilai berdasarkan outcome, bukan hanya penyerapan anggaran. Misalnya, anggaran pendidikan tidak cukup dinilai dari jumlah sekolah atau perangkat yang dibeli, tetapi dari peningkatan literasi, numerasi, keterampilan digital, dan kesiapan kerja. Anggaran kesehatan tidak cukup dinilai dari jumlah fasilitas, tetapi dari akses, kualitas pelayanan, pencegahan penyakit, dan perlindungan finansial. Infrastruktur perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas, akses pasar, pengurangan biaya logistik, keselamatan, dan pemerataan wilayah.

Kebijakan fiskal yang berkeadilan juga harus mempertimbangkan efek distribusional setiap kebijakan besar. Sebelum subsidi diubah, pajak baru diterapkan, atau tarif layanan dinaikkan, pemerintah perlu melakukan distributional impact assessment. Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang

menanggung biaya? Bagaimana dampak terhadap desil pendapatan, wilayah, gender, kelompok usia, dan sektor usaha? Pendekatan ini dapat mencegah kebijakan yang secara makro tampak efisien tetapi secara sosial menciptakan beban yang tidak proporsional.

9. UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Lokal sebagai Mesin Pemulihan yang Inklusif

UMKM memiliki posisi strategis karena menyerap tenaga kerja, mendistribusikan kegiatan ekonomi ke berbagai wilayah, dan menjadi pintu masuk kewirausahaan. Namun romantisasi UMKM tanpa peningkatan produktivitas berisiko mempertahankan usaha dalam skala kecil dan margin rendah. Pemulihan yang berkeadilan harus membantu UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan, teknologi, desain produk, standar kualitas, legalitas, pasar, jaringan rantai pasok, serta kemampuan manajerial.

Pembiayaan perlu bergerak dari sekadar kredit menuju ekosistem pendampingan. Banyak UMKM menghadapi masalah bukan hanya kekurangan modal, tetapi lemahnya pencatatan keuangan, pemasaran, pengadaan, pengendalian mutu, dan kemampuan memenuhi kontrak besar. Bank, fintech, perguruan tinggi, BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan besar dapat membangun skema cluster yang menggabungkan pembiayaan dengan mentoring, digitalisasi, dan offtaking. Keberhasilan program diukur dari kenaikan produktivitas, omzet, margin, jumlah tenaga kerja formal, dan kemampuan masuk rantai pasok.

Koperasi juga relevan sebagai instrumen penguatan posisi tawar. Dalam pertanian, perikanan, industri kreatif, atau ekonomi platform, individu kecil sering berhadapan dengan pembeli, platform, atau pemasok yang jauh lebih besar. Koperasi modern dapat menyediakan agregasi produksi, pembelian input bersama, fasilitas pengolahan, pemasaran, data, dan teknologi. Koperasi bukan sekadar bentuk badan hukum; ia dapat menjadi infrastruktur ekonomi kolektif yang mengubah struktur tawar-menawar.

Ekonomi lokal perlu terhubung dengan strategi nasional. Belanja pemerintah dapat digunakan untuk memperkuat pemasok lokal melalui pengadaan yang transparan dan berkualitas. Pariwisata dapat dikembangkan dengan linkage ke pangan lokal, kerajinan, transportasi, dan budaya. Hilirisasi dapat mensyaratkan pengembangan pemasok lokal dan pelatihan tenaga kerja. Dengan demikian, proyek besar menciptakan multiplier effect di daerah, bukan menjadi enclave ekonomi yang hanya sedikit terhubung dengan masyarakat sekitar.

10. Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi pada Manusia

Pemulihan ekonomi yang berkeadilan tidak mungkin hanya bertumpu pada stimulus jangka pendek. Daya tahan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan adalah investasi produktivitas sekaligus instrumen pemerataan. Anak yang mengalami stunting, sekolah dengan kualitas rendah, atau tidak memiliki akses digital akan memasuki pasar kerja dengan peluang yang lebih sempit. Ketimpangan pada awal kehidupan kemudian berubah menjadi ketimpangan pendapatan pada masa dewasa.

Kebijakan pendidikan harus berorientasi pada learning outcomes. Tantangan utama bukan hanya meningkatkan lama sekolah, tetapi memastikan siswa menguasai kemampuan dasar, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Di era AI, kurikulum perlu menyeimbangkan kemampuan teknologi dengan kemampuan manusia yang sulit diotomatisasi:

penalaran, kreativitas, etika, empati, kepemimpinan, dan pemecahan masalah kompleks. Program reskilling dan upskilling perlu tersedia bagi pekerja dewasa, bukan hanya generasi muda.

Sektor kesehatan memiliki dampak ekonomi yang langsung. Populasi sehat lebih produktif, rumah tangga menghadapi lebih sedikit pengeluaran katastrofik, dan partisipasi kerja meningkat. Pemulihan yang berkeadilan membutuhkan layanan primer yang kuat, pencegahan penyakit, gizi, kesehatan ibu-anak, kesehatan mental, serta sistem rujukan yang efektif. Teknologi telemedicine dapat memperluas akses, tetapi tidak boleh menggantikan kebutuhan akan tenaga kesehatan dan fasilitas fisik di wilayah yang tertinggal.

Dalam perspektif kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan bukan sekadar pengeluaran sosial. Keduanya adalah infrastruktur produktivitas. Jalan menghubungkan tempat, sedangkan pendidikan dan kesehatan menghubungkan manusia dengan peluang. Karena itu, ketika pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal, pengurangan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat menghasilkan penghematan semu yang dibayar mahal melalui produktivitas rendah, penyakit, kemiskinan antargenerasi, dan ketergantungan sosial di masa depan.

11. Transformasi Digital dan AI: Memperluas Kesempatan tanpa Menciptakan Ketimpangan Baru

Digitalisasi dan artificial intelligence (AI) membuka peluang besar bagi produktivitas, layanan publik, pendidikan, kesehatan, logistik, pertanian, dan industri. Namun teknologi bukan kekuatan netral. Dampaknya bergantung pada siapa yang memiliki akses, data, modal, keterampilan, dan kekuatan pasar. Jika manfaat teknologi terkonsentrasi pada perusahaan besar dan pekerja berpendidikan tinggi, digitalisasi dapat memperlebar ketimpangan. Sebaliknya, jika dirancang secara inklusif, teknologi dapat menurunkan biaya transaksi, memperluas akses pengetahuan, dan membuka pasar bagi pelaku kecil.

Kebijakan digital yang berkeadilan perlu dimulai dari infrastruktur. Konektivitas yang andal dan terjangkau harus diperlakukan sebagai enabling infrastructure, terutama untuk sekolah, puskesmas, desa, UMKM, dan daerah kepulauan. Selanjutnya adalah keterampilan. Literasi digital tidak cukup berarti kemampuan menggunakan aplikasi; masyarakat perlu memahami keamanan data, penipuan, AI generatif, verifikasi informasi, transaksi digital, dan perlindungan privasi. Untuk pekerja, program upskilling perlu dikaitkan dengan perubahan tugas, bukan hanya pelatihan perangkat lunak.

AI juga mengubah organisasi kerja. Beberapa tugas administratif, analitis, dan layanan dapat diotomatisasi atau diaugmentasi. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa teknologi dapat menghilangkan sebagian tugas sambil menciptakan tugas baru. Tantangan kebijakan adalah mempercepat komplementaritas antara manusia dan teknologi. Insentif investasi dapat diarahkan pada teknologi yang meningkatkan produktivitas pekerja, bukan hanya menggantikan tenaga kerja karena biaya jangka pendek. Perguruan tinggi dan perusahaan perlu membangun micro-credential dan modular learning agar pekerja dapat belajar tanpa harus keluar lama dari pekerjaan.

Aspek lain adalah tata kelola data dan algoritma. Keputusan mengenai kredit, rekrutmen, bantuan sosial, asuransi, atau penilaian kinerja dapat dipengaruhi model algoritmik. Jika data mengandung bias, AI dapat mereplikasi ketidakadilan dengan skala lebih besar. Karena itu, audit algoritma, transparansi, human oversight, mekanisme banding, dan perlindungan data harus menjadi bagian dari agenda

kesejahteraan. Keadilan digital berarti bahwa efisiensi tidak boleh menghapus hak warga untuk memahami dan menantang keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

12. Pemerataan Wilayah dan Perspektif Kepulauan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan variasi biaya logistik, kepadatan penduduk, sumber daya, kapasitas pemerintah daerah, dan akses layanan yang sangat besar. Karena itu, pemulihan ekonomi yang berkeadilan harus memiliki dimensi spasial. Pertumbuhan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dapat meningkatkan PDB nasional tetapi tetap meninggalkan kesenjangan antarwilayah. Data BPS menunjukkan bahwa Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional; pada triwulan II 2026 kontribusinya sekitar 56,47 persen terhadap ekonomi Indonesia. Dominasi tersebut mencerminkan keunggulan aglomerasi, tetapi juga menjadi alasan untuk memperkuat pusat pertumbuhan di luar Jawa.

Pemerataan tidak berarti memindahkan seluruh aktivitas ekonomi dari pusat yang produktif. Strategi yang lebih realistis adalah membangun jaringan pusat pertumbuhan yang terhubung: kota menengah, kawasan industri, pelabuhan, sentra pertanian, kawasan wisata, dan pusat pendidikan. Infrastruktur transportasi dan digital harus mengurangi biaya konektivitas antarpulau. Pelabuhan, cold chain, kapal logistik, jalan produksi, dan jaringan broadband dapat memiliki dampak kesejahteraan yang sangat besar bagi wilayah yang selama ini mengalami high-cost economy.

Dana transfer ke daerah sebaiknya semakin berbasis kebutuhan dan hasil. Daerah dengan biaya pelayanan lebih tinggi, luas geografis besar, atau karakter kepulauan memerlukan formula yang sensitif terhadap cost disability. Namun transfer juga harus mendorong perbaikan tata kelola, kualitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak sekadar membagi anggaran, tetapi membangun kapasitas negara di tingkat lokal.

Keadilan wilayah juga menuntut agar ekstraksi sumber daya menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Daerah pertambangan, perkebunan, atau kehutanan harus memperoleh kesempatan kerja berkualitas, pendapatan daerah, infrastruktur, pemulihan lingkungan, dan pengembangan ekonomi pasca-ekstraksi. Tanpa hal tersebut, daerah dapat mengalami paradoks sumber daya: kaya secara statistik tetapi menghadapi kemiskinan, kerusakan lingkungan, atau ketergantungan pada satu komoditas.

13. Ekonomi Hijau dan Just Transition

Pemulihan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perubahan iklim. Banjir, kekeringan, kebakaran, perubahan pola musim, kenaikan muka laut, dan gangguan produksi pangan memiliki biaya ekonomi yang langsung, terutama bagi rumah tangga miskin yang memiliki aset dan perlindungan lebih terbatas. Karena itu, investasi pada ketahanan iklim adalah investasi kesejahteraan. Infrastruktur harus dirancang tahan terhadap risiko, tata ruang perlu memperhitungkan bencana, dan sistem perlindungan sosial perlu mampu merespons shock iklim.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon akan menciptakan pemenang dan pihak yang terdampak. Energi terbarukan, kendaraan listrik, efisiensi energi, rehabilitasi ekosistem, ekonomi sirkular, dan pertanian berkelanjutan dapat menciptakan pekerjaan baru. Namun pekerja dan daerah yang bergantung pada industri berkarbon tinggi dapat kehilangan sumber pendapatan. Inilah pentingnya just

transition: transisi tidak hanya mengejar target emisi, tetapi juga menyediakan reskilling, jaminan pendapatan transisi, diversifikasi ekonomi daerah, dan dialog dengan pekerja serta masyarakat.

Keadilan lingkungan juga berkaitan dengan siapa menikmati manfaat sumber daya. Pembangunan bendungan, tambang, perkebunan, atau kawasan industri dapat memberikan manfaat nasional tetapi menimbulkan biaya lokal berupa perubahan mata pencaharian, degradasi lingkungan, atau relokasi. Prosedur partisipatif, kompensasi yang adil, pembagian manfaat, dan pemulihan ekologi harus menjadi bagian dari perhitungan ekonomi. Efisiensi yang hanya menghitung nilai investasi dan output tanpa menghitung biaya sosial-ekologis akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap.

Ekonomi hijau dapat menjadi peluang industrialisasi baru bagi Indonesia, khususnya melalui energi bersih, mineral strategis, bioekonomi, pengelolaan hutan, dan solusi berbasis alam. Namun hilirisasi perlu disertai standard lingkungan, pengembangan teknologi domestik, keterampilan tenaga kerja, serta linkage dengan UMKM. Nilai tambah sebaiknya tidak hanya tercermin pada ekspor, tetapi juga pada peningkatan kemampuan nasional dan kesejahteraan komunitas.

14. Reformasi Tata Kelola: Negara yang Mampu Mengubah Anggaran menjadi Hasil

Kebijakan yang baik di atas kertas dapat gagal jika kapasitas implementasi rendah. Karena itu, pemulihan yang berkeadilan memerlukan capable state: birokrasi yang mampu mengidentifikasi masalah, mengkoordinasikan lembaga, menggunakan data, melakukan pengadaan, mengevaluasi program, belajar dari kegagalan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Kualitas institusi menentukan seberapa efektif rupiah anggaran berubah menjadi layanan dan kesejahteraan.

Fragmentasi merupakan salah satu tantangan klasik. Program kemiskinan, UMKM, pelatihan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pangan sering berada di banyak kementerian atau pemerintah daerah. Tanpa interoperabilitas data dan koordinasi, masyarakat harus menghadapi banyak pintu dan persyaratan. Pendekatan whole-of-government diperlukan: tujuan bersama, indikator bersama, pertukaran data yang aman, dan akuntabilitas yang jelas. Pemerintah daerah perlu menjadi mitra desain, bukan hanya pelaksana instruksi pusat.

Tata kelola juga menyangkut partisipasi. Kebijakan akan lebih legitimate ketika masyarakat memahami tujuan, trade-off, dan alasan pemilihan instrumen. Konsultasi publik tidak boleh menjadi formalitas. Serikat pekerja, asosiasi usaha, akademisi, masyarakat sipil, organisasi disabilitas, kelompok perempuan, komunitas lokal, dan generasi muda perlu memiliki ruang untuk memberikan masukan. Dialog sosial sangat penting ketika perubahan kebijakan menimbulkan biaya transisi.

Keterbukaan data publik dapat memperkuat akuntabilitas. Dashboard kinerja yang mudah dipahami memungkinkan masyarakat menilai apakah program berhasil. Namun keterbukaan harus disertai konteks agar angka tidak menyesatkan. Indikator perlu dibedakan antara input, output, outcome, dan impact. Penyerapan anggaran adalah input; jumlah peserta pelatihan adalah output; peningkatan keterampilan dan pendapatan adalah outcome; sedangkan mobilitas sosial dan penurunan kemiskinan antargenerasi merupakan impact.

15. Mengukur Keberhasilan: Dashboard Kesejahteraan Pasca-PDB

Jika kesejahteraan adalah tujuan utama, maka sistem pengukuran harus mencerminkan tujuan tersebut. PDB tetap penting, tetapi perlu ditempatkan dalam dashboard yang lebih luas. Dashboard pemulihan berkeadilan dapat memuat setidaknya delapan kelompok indikator: pertumbuhan dan stabilitas; distribusi pendapatan; kemiskinan dan kerentanan; kualitas pekerjaan; kesehatan dan pendidikan; akses layanan dasar; ketahanan lingkungan; serta kepercayaan dan kualitas institusi.

Pada dimensi ekonomi, selain pertumbuhan PDB perlu dilihat pertumbuhan pendapatan median dan konsumsi per kapita menurut kelompok pendapatan. Jika PDB naik tetapi pendapatan median stagnan, manfaat pertumbuhan kemungkinan terkonsentrasi. Gini ratio dapat digunakan untuk melihat ketimpangan, namun perlu dilengkapi dengan share pendapatan atau pengeluaran kelompok bawah 40 persen, mobilitas pendapatan, dan ketimpangan aset. Kemiskinan perlu diukur dengan headcount, depth, severity, serta dimensi nonmoneter.

Pada dimensi pekerjaan, indikator pengangguran perlu dilengkapi dengan underemployment, informalitas, rata-rata upah riil, kepesertaan jaminan sosial, jam kerja, kecelakaan kerja, dan mismatch keterampilan. Untuk generasi muda, indikator NEET—tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan—sangat penting. Untuk perempuan, perlu dilihat partisipasi angkatan kerja, kesenjangan upah, akses penitipan anak, dan keamanan kerja. Dengan dashboard ini, pemerintah dapat mengetahui bukan hanya apakah pekerjaan bertambah, tetapi apakah pekerjaan tersebut meningkatkan kehidupan.

Pengukuran harus cukup granular. Rata-rata nasional dapat menyembunyikan variasi antarprovinsi, kabupaten, desa-kota, gender, usia, disabilitas, dan kelompok pekerjaan. Digitalisasi statistik memungkinkan data yang lebih cepat, tetapi kualitas, privasi, dan representativitas tetap harus dijaga. Tujuan akhirnya adalah menciptakan feedback loop: data memandu kebijakan, kebijakan diuji melalui outcome, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki desain.

16. Arsitektur Kebijakan Pemulihan Berkeadilan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pemulihan berkeadilan dapat dirancang dalam tiga horizon. Horizon pertama adalah perlindungan segera: menjaga daya beli, stabilitas pangan, layanan kesehatan, bantuan bagi penganggur atau korban bencana, serta dukungan likuiditas bagi usaha yang masih viable. Tujuannya mencegah kerusakan permanen akibat guncangan. Horizon kedua adalah pemulihan produktif: penciptaan kerja, investasi, penguatan UMKM, reskilling, perbaikan logistik, dan reformasi iklim usaha. Horizon ketiga adalah transformasi struktural: pendidikan, digitalisasi, ekonomi hijau, reformasi fiskal, dan pembangunan wilayah.

Ketiga horizon harus berjalan bersamaan tetapi dengan intensitas berbeda. Jika pemerintah hanya fokus pada bantuan jangka pendek, ketergantungan dan masalah struktural tidak terselesaikan. Jika hanya fokus pada reformasi jangka panjang, masyarakat yang sedang mengalami tekanan dapat kehilangan kemampuan bertahan. Jika hanya mengejar investasi, manfaatnya dapat terkonsentrasi. Arsitektur yang baik menghubungkan perlindungan, produktivitas, dan transformasi.

Prinsip kedua adalah targeting yang dinamis. Kelompok miskin kronis membutuhkan dukungan intensif, tetapi kelompok near-poor dan kelas menengah rentan juga perlu instrumen perlindungan terhadap shock. Kebijakan sebaiknya menggunakan kombinasi universal basic services dengan

dukungan terarah. Pendidikan dasar, layanan kesehatan esensial, vaksinasi, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur digital memiliki karakter universal; bantuan pendapatan, subsidi iuran, atau dukungan usaha dapat ditargetkan berdasarkan kebutuhan.

Prinsip ketiga adalah conditionality yang cerdas. Insentif kepada perusahaan dapat dikaitkan dengan penciptaan pekerjaan, training, transfer teknologi, penggunaan pemasok lokal, dan standar lingkungan. Dukungan kepada UMKM dapat dihubungkan dengan pembukuan, formalisasi, atau peningkatan kualitas secara bertahap. Kontrak publik dapat memasukkan standar kerja dan keberlanjutan. Dengan demikian, uang publik tidak hanya membeli output, tetapi membentuk perilaku ekonomi yang mendukung tujuan sosial.

17. Ilustrasi Kasus: Dari Pertumbuhan Kawasan Industri ke Kesejahteraan Lokal

Bayangkan sebuah kabupaten yang menerima investasi besar pada kawasan industri baru. Dalam pendekatan konvensional, keberhasilan mungkin diukur dari nilai investasi, luas kawasan, jumlah pabrik, dan kontribusi terhadap PDRB. Dalam pendekatan pemulihan berkeadilan, evaluasinya lebih luas. Pemerintah daerah bertanya: berapa persen pekerja berasal dari wilayah sekitar? Apakah mereka memperoleh pelatihan? Bagaimana kenaikan upah dibanding biaya hidup? Apakah UMKM lokal menjadi pemasok? Apakah transportasi publik tersedia? Apakah harga tanah dan sewa rumah melonjak sehingga penduduk lama terdorong keluar? Apakah air dan lingkungan tetap terjaga?

Untuk menjawabnya, pemerintah membangun local development compact bersama perusahaan, sekolah vokasi, perguruan tinggi, serikat pekerja, dan komunitas. Perusahaan mendapatkan kemudahan perizinan dan infrastruktur, tetapi berkomitmen pada apprenticeship, transparansi kebutuhan keterampilan, dan pengembangan supplier lokal. Sekolah vokasi menyesuaikan kurikulum, pemerintah menyediakan transportasi dan perumahan pekerja yang terjangkau, sedangkan layanan kesehatan diperkuat seiring pertumbuhan penduduk.

Pada sisi UMKM, pusat supplier development membantu pelaku lokal memenuhi standar kualitas dan keamanan. Bank menyediakan pembiayaan berbasis kontrak, bukan hanya agunan. Platform digital pengadaan memungkinkan perusahaan besar mencari pemasok lokal secara transparan. Pemerintah daerah memantau indikator pekerjaan formal, upah riil, partisipasi perempuan, kecelakaan kerja, pertumbuhan UMKM, dan kualitas lingkungan.

Dalam skenario ini, pertumbuhan industri tidak lagi berdiri terpisah dari kesejahteraan. Investasi menjadi jangkar bagi ekosistem lokal. Bahkan jika pertumbuhan PDRB sama dengan skenario konvensional, kualitas pembangunan lebih tinggi karena manfaat menyebar, risiko dikendalikan, dan kapasitas lokal meningkat. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keadilan dapat dibangun melalui desain institusional, bukan hanya melalui transfer setelah ketimpangan terjadi.

18. Tantangan Implementasi dan Potensi Trade-off

Agenda pemulihan berkeadilan menghadapi beberapa tantangan. Pertama adalah keterbatasan fiskal. Tidak semua program dapat dibiayai sekaligus. Karena itu, prioritas harus didasarkan pada social return dan multiplier jangka panjang. Program yang melindungi gizi anak, pendidikan dasar, kesehatan primer, dan pekerjaan produktif sering memiliki dampak lintas generasi yang tinggi. Evaluasi program dan pengurangan belanja rendah dampak menjadi penting untuk menciptakan ruang.

Kedua adalah risiko salah sasaran dan moral hazard. Bantuan yang tidak tepat dapat dinikmati kelompok yang tidak membutuhkan, sedangkan penerima yang seharusnya justru terlewat. Solusinya bukan menghapus perlindungan, tetapi memperbaiki data, verifikasi, mekanisme pengaduan, dan desain insentif. Sistem digital dapat membantu, tetapi harus mempertahankan kanal offline bagi warga yang memiliki keterbatasan akses.

Ketiga adalah konflik antara kecepatan dan kualitas. Dalam krisis, pemerintah perlu bergerak cepat, tetapi proses cepat dapat meningkatkan risiko tata kelola. Karena itu, sistem harus dibangun sebelum krisis: registry, protokol, framework contract, mekanisme pembayaran, dan audit berbasis risiko. Negara yang siap dapat bergerak cepat tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Keempat adalah politik distribusi. Reformasi subsidi, pajak, tata ruang, atau pasar tenaga kerja menciptakan kelompok yang merasa dirugikan. Kebijakan teknis yang tidak disertai komunikasi dan kompensasi dapat menghadapi resistensi. Karena itu, reformasi perlu memiliki sequencing, dialog, transisi, dan narasi publik yang jelas. Keadilan prosedural membantu masyarakat menerima perubahan karena mereka memahami tujuan dan memiliki ruang untuk didengar.

19. Agenda Kebijakan Prioritas untuk Indonesia

Pertama, pemerintah perlu menjadikan kualitas pekerjaan sebagai indikator inti pembangunan. Target investasi, industri, dan hilirisasi harus dilengkapi target pekerjaan formal, kenaikan produktivitas, upah riil, keterampilan, dan perlindungan sosial. Program reskilling perlu berbasis permintaan nyata dan melibatkan perusahaan sejak desain.

Kedua, perlindungan sosial perlu diperkuat menjadi sistem adaptif yang dapat merespons pengangguran, bencana, shock pangan, dan perubahan iklim. Data harus mutakhir, interoperabel, aman, serta menyediakan mekanisme koreksi. Pekerja informal dan platform perlu memiliki jalur kepesertaan yang lebih fleksibel.

Ketiga, prioritas fiskal harus diarahkan pada layanan dasar dan investasi produktif. Setiap program besar sebaiknya memiliki analisis dampak distribusional dan indikator outcome. Reformasi penerimaan harus memperluas basis pajak secara adil dan mengurangi penghindaran, sambil menjaga administrasi sederhana bagi usaha kecil.

Keempat, UMKM dan koperasi perlu diposisikan sebagai bagian dari rantai nilai, bukan sektor bantuan. Kebijakan supplier development, standardisasi, pembiayaan kontraktual, digitalisasi, dan pengadaan publik dapat mempercepat peningkatan produktivitas. Kelima, pembangunan wilayah perlu menurunkan biaya logistik dan memperkuat kota-kota menengah, pelabuhan, sentra produksi, serta layanan publik di luar pusat ekonomi utama.

Keenam, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas digital harus diperlakukan sebagai infrastruktur dasar kesejahteraan. Kualitas layanan perlu diprioritaskan, bukan hanya cakupan. Ketujuh, strategi AI nasional dan digitalisasi perlu memiliki dimensi sosial: keterampilan, perlindungan pekerja, tata kelola data, audit bias, dan akses bagi UMKM serta layanan publik. Kedelapan, transisi hijau perlu didesain sebagai just transition dengan perlindungan pekerja dan diversifikasi ekonomi daerah.

Kesembilan, pemerintah perlu mengadopsi dashboard kesejahteraan yang melengkapi PDB. Laporan ekonomi nasional dan daerah sebaiknya secara rutin menyajikan pertumbuhan pendapatan median,

kualitas pekerjaan, kemiskinan dan kerentanan, ketimpangan, akses pendidikan dan kesehatan, serta indikator lingkungan. Kesepuluh, seluruh agenda harus didukung tata kelola yang mampu belajar. Pilot, evaluasi, eksperimen kebijakan, dan transparansi data perlu menjadi bagian dari budaya pemerintahan.

20. Kelas Menengah, Mobilitas Sosial, dan Risiko Kerentanan Baru

Pembahasan mengenai keadilan sering berfokus pada kelompok miskin, padahal ketahanan kelas menengah juga sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Kelas menengah berperan sebagai konsumen, pembayar pajak, sumber tabungan, tenaga profesional, dan basis kewirausahaan. Namun status kelas menengah tidak selalu berarti aman. Biaya pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pengasuhan anak dapat meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Rumah tangga yang tidak masuk kategori miskin sering tidak memenuhi syarat bantuan sosial, tetapi belum memiliki aset dan tabungan yang cukup untuk menyerap guncangan besar. Kondisi ini menciptakan "missing middle" dalam perlindungan sosial: terlalu mampu untuk menerima bantuan, tetapi terlalu rentan untuk sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar.

Kebijakan pemulihan yang berkeadilan perlu memperluas perhatian dari pengentasan kemiskinan menuju mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti anak yang lahir dari keluarga berpendapatan rendah memiliki kesempatan realistis untuk mencapai kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses ekonomi. Jika mobilitas rendah, ketimpangan menjadi semakin melekat antargenerasi. Dalam situasi demikian, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa memperkuat harapan sosial karena posisi seseorang lebih banyak ditentukan oleh kondisi kelahiran daripada kemampuan dan usaha. Karena itu, kualitas sekolah publik, akses perguruan tinggi, transportasi, kesehatan, dan perumahan memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan layanan; semuanya merupakan mekanisme mobilitas.

Perumahan layak merupakan contoh yang sering terabaikan. Di kawasan metropolitan, biaya sewa dan harga rumah dapat menyerap bagian besar pendapatan. Pekerja kemudian tinggal semakin jauh dari lokasi kerja, menghadapi waktu perjalanan panjang dan biaya transportasi tinggi. Secara statistik mereka bekerja dan mungkin tidak miskin, tetapi kualitas hidup menurun karena waktu untuk keluarga, belajar, istirahat, atau kegiatan sosial berkurang. Karena itu, kebijakan perumahan terjangkau dan transportasi publik harus dipahami sebagai kebijakan produktivitas dan kesejahteraan. Kota yang mampu mengurangi waktu tempuh dan beban biaya tempat tinggal secara efektif menaikkan pendapatan riil rumah tangga tanpa harus menaikkan upah nominal dalam jumlah yang sama.

Mobilitas sosial juga dipengaruhi oleh akses terhadap aset. Rumah tangga yang hanya bergantung pada upah lebih rentan dibanding rumah tangga yang memiliki tabungan, rumah, tanah produktif, usaha, atau instrumen finansial. Kebijakan literasi keuangan, tabungan jangka panjang, kepemilikan rumah yang bertanggung jawab, serta akses investasi dengan perlindungan konsumen dapat membantu membangun asset-based welfare. Namun kebijakan harus menghindari dorongan berutang berlebihan. Tujuannya adalah memperluas kepemilikan aset produktif dan meningkatkan ketahanan, bukan mengubah konsumsi hari ini menjadi kewajiban finansial masa depan.

21. Gender, Generasi Muda, Disabilitas, dan Keadilan Kesempatan

Keadilan ekonomi tidak dapat dinilai hanya melalui rata-rata nasional karena hambatan yang dihadapi kelompok masyarakat berbeda. Perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan masyarakat di wilayah terpencil menghadapi kombinasi hambatan yang tidak selalu terlihat dalam indikator makro. Kesenjangan partisipasi kerja perempuan, misalnya, tidak semata-mata berkaitan dengan pilihan individual. Akses penitipan anak, keamanan transportasi, norma sosial, fleksibilitas kerja, pembagian kerja domestik, dan diskriminasi dapat membatasi pilihan. Kebijakan yang menyediakan childcare terjangkau, cuti orang tua yang wajar, lingkungan kerja aman, dan kesempatan kerja fleksibel dapat meningkatkan partisipasi sekaligus kesejahteraan keluarga.

Generasi muda menghadapi tantangan berbeda. Mereka memasuki pasar kerja pada saat teknologi berubah cepat, perusahaan menuntut pengalaman, dan biaya membangun kehidupan mandiri meningkat. Masa transisi dari pendidikan ke pekerjaan menjadi periode kritis. Pengangguran muda yang panjang dapat menimbulkan scarring effect: keterampilan menurun, jaringan kerja terbatas, dan upah awal lebih rendah yang dampaknya bertahan lama. Karena itu, apprenticeship yang berkualitas, career services, magang berbayar, sertifikasi keterampilan, dan informasi pasar kerja harus menjadi bagian inti kebijakan pemulihan. Perguruan tinggi juga perlu memperkuat hubungan dengan dunia kerja tanpa kehilangan fungsi akademik dan kritisnya.

Penyandang disabilitas membutuhkan desain kebijakan yang berangkat dari prinsip aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Hambatan sering terletak bukan pada kemampuan individu, melainkan pada lingkungan fisik, proses rekrutmen, teknologi, dan budaya organisasi yang tidak inklusif. Layanan ketenagakerjaan, transportasi, gedung, platform digital, dan tempat kerja perlu memenuhi standar aksesibilitas. Insentif perusahaan dapat dikaitkan dengan praktik inklusif, sementara pemerintah harus menyediakan data yang memadai untuk memantau partisipasi dan kualitas pekerjaan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya ILO di Indonesia untuk memperluas layanan ketenagakerjaan yang inklusif.

Prinsip pentingnya adalah equality of opportunity yang substantif. Kesempatan yang sama secara formal belum tentu cukup apabila titik awal sangat berbeda. Beasiswa, afirmasi, dukungan aksesibilitas, program remedial, konektivitas, dan mentoring dapat dibenarkan ketika bertujuan mengatasi hambatan struktural. Namun program afirmatif perlu dievaluasi secara transparan agar benar-benar memperluas kapasitas, bukan menjadi simbol administratif. Dengan demikian, keadilan kesempatan berarti menghilangkan hambatan yang dapat dicegah dan memastikan bahwa bakat tidak terbuang hanya karena seseorang lahir di lokasi, keluarga, atau kondisi fisik tertentu.

22. Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesejahteraan Produsen

Pangan berada di jantung pemulihan ekonomi karena berhubungan langsung dengan inflasi, kesehatan, kemiskinan, dan stabilitas sosial. Rumah tangga miskin mengalokasikan bagian besar pengeluaran untuk makanan sehingga gangguan harga memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan. Namun kebijakan pangan tidak boleh hanya melihat konsumen. Petani, nelayan, peternak, dan pelaku distribusi juga merupakan rumah tangga yang membutuhkan pendapatan layak. Tantangan kebijakan adalah menjaga harga konsumen tetap wajar sambil memastikan produsen memperoleh insentif yang cukup untuk memproduksi dan berinvestasi.

Produktivitas pertanian perlu ditingkatkan melalui kombinasi teknologi, kelembagaan, dan infrastruktur. Benih, irigasi, penyuluhan, mekanisasi, data cuaca, akses kredit, asuransi, dan teknologi presisi dapat meningkatkan hasil. Tetapi teknologi hanya efektif jika petani memiliki skala, pengetahuan, akses pasar, dan kepastian harga yang memadai. Koperasi atau kelompok usaha dapat mengurangi fragmentasi dan meningkatkan daya tawar. Fasilitas pengolahan pascapanen memungkinkan nilai tambah tetap berada di wilayah produksi, bukan seluruhnya berpindah ke rantai distribusi di hilir.

Ketahanan pangan juga memerlukan diversifikasi. Ketergantungan berlebihan pada beberapa komoditas meningkatkan risiko terhadap cuaca, impor, dan gangguan logistik. Indonesia memiliki keragaman sumber pangan lokal yang dapat dikembangkan sesuai ekologi wilayah. Diversifikasi tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas gizi. Kebijakan pengadaan pangan untuk sekolah, rumah sakit, atau program sosial dapat digunakan untuk menciptakan pasar yang stabil bagi produsen lokal dengan tetap menjaga standar mutu.

Dari perspektif keadilan, petani kecil perlu dilindungi dari risiko yang tidak dapat mereka kendalikan. Perubahan iklim membuat pola musim kurang pasti, sementara harga input dan output dapat berfluktuasi. Asuransi pertanian, early warning system, penyimpanan, kontrak yang adil, dan akses informasi harga dapat membagi risiko secara lebih seimbang. Tujuan akhir bukan mempertahankan pertanian sebagai sektor berproduktivitas rendah, melainkan mentransformasikannya menjadi kegiatan modern, bernilai tambah, dan mampu menyediakan kehidupan yang layak bagi generasi muda.

23. Pembiayaan Pembangunan dan Peran Sektor Keuangan

Sektor keuangan memiliki fungsi utama mengalokasikan tabungan menuju investasi produktif, tetapi dalam pemulihan berkeadilan fungsi tersebut perlu dinilai dari dampaknya terhadap ekonomi nyata. Kredit yang tumbuh cepat tidak selalu berarti kesejahteraan meningkat apabila sebagian besar mengalir ke aktivitas spekulatif atau konsumsi yang tidak produktif. Sebaliknya, pembiayaan untuk rumah pertama yang terjangkau, UMKM produktif, pertanian, energi bersih, infrastruktur, dan inovasi dapat memperluas kapasitas ekonomi. Karena itu, kebijakan keuangan harus menjaga stabilitas sekaligus mendorong alokasi modal ke sektor dengan nilai sosial dan produktif yang tinggi.

Akses keuangan masih memiliki dimensi ketimpangan. Pelaku kecil sering menghadapi biaya pinjaman lebih tinggi, tenor lebih pendek, dan persyaratan agunan yang sulit dipenuhi. Teknologi fintech dapat membantu melalui data alternatif dan proses yang lebih cepat, tetapi juga menimbulkan risiko over-indebtedness dan penyalahgunaan data. Regulasi perlu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen. Transparansi bunga efektif, larangan praktik penagihan abusif, mekanisme pengaduan, dan literasi keuangan merupakan bagian dari keadilan finansial.

Pembiayaan pembangunan jangka panjang juga memerlukan pasar modal, lembaga pembiayaan pembangunan, dan blended finance. Proyek hijau, transportasi publik, air bersih, perumahan, dan infrastruktur digital sering memiliki manfaat sosial besar tetapi pengembalian finansial langsung yang tidak cukup menarik investor swasta. Negara dapat berperan melalui penjaminan, co-investment, viability gap funding, atau instrumen berbagi risiko. Namun penggunaan dana publik harus memiliki additionality yang jelas: intervensi seharusnya membuat proyek yang bernilai sosial menjadi layak, bukan mensubsidi keuntungan yang sebenarnya sudah dapat diperoleh tanpa dukungan negara.

Dalam kerangka public value, hubungan negara dan sektor swasta perlu didasarkan pada pembagian risiko dan imbal hasil yang lebih seimbang. Jika negara menanggung risiko awal melalui riset, infrastruktur, atau insentif, masyarakat seharusnya memperoleh manfaat ketika proyek berhasil, misalnya melalui harga yang wajar, kewajiban layanan, royalti, saham, atau reinvestasi. Prinsip ini memperkuat legitimasi penggunaan dana publik dan memastikan inovasi yang dibiayai bersama menghasilkan nilai yang juga dibagi bersama.

24. Kontrak Sosial Baru untuk Ekonomi yang Tangguh

Pada tingkat paling mendasar, pemulihan ekonomi yang berkeadilan adalah persoalan kontrak sosial. Warga bersedia membayar pajak, mematuhi aturan, dan menerima perubahan kebijakan apabila mereka percaya bahwa institusi bekerja secara adil dan manfaat pembangunan dapat dirasakan. Sebaliknya, jika masyarakat melihat bahwa beban dibagi secara tidak seimbang, kepercayaan menurun. Ketidakpercayaan kemudian meningkatkan biaya transaksi, memperlemah kepatuhan pajak, mempersulit reformasi, dan mendorong politik jangka pendek. Karena itu, trust bukan sekadar isu sosial; ia adalah modal ekonomi.

Kontrak sosial modern harus menyesuaikan diri dengan perubahan struktur pekerjaan. Model lama sering diasumsikan bahwa seseorang bekerja penuh waktu pada satu perusahaan, memperoleh manfaat, dan pensiun setelah karier panjang. Ekonomi modern lebih cair: pekerja berpindah pekerjaan, menjadi freelancer, menjalankan usaha, bekerja melalui platform, atau menggabungkan beberapa sumber pendapatan. Perlindungan sosial karenanya perlu melekat pada individu dan bersifat portabel, bukan semata pada hubungan kerja tertentu. Hak dan manfaat mengikuti pekerja ketika mereka berpindah sektor atau status.

Kontrak sosial juga perlu memasukkan hak atas pembelajaran sepanjang hayat. Ketika perubahan teknologi memperpendek umur keterampilan, pendidikan tidak dapat berhenti pada usia awal dua puluhan. Pemerintah, perusahaan, dan individu perlu berbagi tanggung jawab membiayai reskilling. Skema rekening belajar, dana pelatihan sektor, kredit pajak, atau matching contribution dapat dipertimbangkan. Yang penting, akses pelatihan tidak hanya tersedia bagi pekerja perusahaan besar, tetapi juga pekerja UMKM, informal, dan mereka yang sedang mencari kerja.

Akhirnya, kontrak sosial perlu menghubungkan hak dengan tanggung jawab. Negara berkewajiban menyediakan kesempatan dan perlindungan dasar, perusahaan berkewajiban menciptakan nilai tanpa memindahkan seluruh biaya sosial kepada masyarakat, dan warga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi, membayar pajak sesuai kemampuan, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kapasitas diri. Kesejahteraan yang berkelanjutan tidak lahir dari negara, pasar, atau masyarakat secara terpisah, melainkan dari hubungan yang saling memperkuat di antara ketiganya.

25. Peran Pemerintah Daerah dan Inovasi Kebijakan Lokal

Pemulihan ekonomi yang berkeadilan pada akhirnya terjadi di wilayah tempat warga hidup, bekerja, bersekolah, memperoleh layanan kesehatan, dan membangun usaha. Karena itu, pemerintah daerah memegang peranan yang tidak dapat digantikan oleh kebijakan pusat. Pemerintah pusat dapat menetapkan standar, menyediakan pendanaan, dan membangun sistem nasional, tetapi variasi masalah membutuhkan solusi lokal. Kabupaten dengan basis pertanian menghadapi persoalan berbeda dari kota

metropolitan, daerah tambang, wilayah wisata, atau kabupaten kepulauan. Desentralisasi memberi ruang bagi eksperimen kebijakan selama akuntabilitas dan kapasitas tetap dijaga.

Inovasi lokal dapat dimulai dari penggunaan data untuk memetakan kantong kemiskinan, pengangguran muda, akses sekolah, stunting, kualitas perumahan, atau hambatan UMKM. Dengan data geospasial dan administrasi yang baik, intervensi dapat diarahkan lebih presisi. Misalnya, pemerintah daerah dapat menghubungkan pelatihan tenaga kerja dengan investasi baru, mengintegrasikan bantuan UMKM dengan pengadaan lokal, atau menggabungkan program penanganan stunting dengan sanitasi, air bersih, pendidikan orang tua, dan perlindungan sosial. Integrasi seperti ini sering menghasilkan dampak lebih besar daripada program sektoral yang berjalan sendiri.

Kapasitas daerah perlu diperkuat melalui pembelajaran antardaerah. Praktik baik tidak cukup dikumpulkan sebagai dokumentasi; diperlukan mekanisme untuk menguji apakah praktik tersebut dapat direplikasi. Pemerintah pusat dapat menyediakan innovation fund yang mendukung pilot dengan evaluasi yang jelas. Daerah yang berhasil mencapai outcome dapat memperoleh insentif tambahan, tetapi desain insentif harus mempertimbangkan kondisi awal agar daerah dengan masalah lebih berat tidak justru selalu kalah. Prinsipnya adalah rewarding improvement, bukan hanya rewarding level.

Partisipasi warga di tingkat lokal juga lebih mudah dibangun karena dampak kebijakan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Musyawarah perencanaan, forum warga, konsultasi digital, serta mekanisme pengaduan dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang sering tidak terlihat dalam data statistik. Namun partisipasi harus inklusif; kelompok miskin, perempuan, pekerja informal, dan penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses yang nyata, bukan sekadar undangan formal. Pemerintah daerah yang mampu menggabungkan data, partisipasi, dan eksperimen kebijakan akan menjadi laboratorium penting bagi pemulihan yang berkeadilan.

26. Produktivitas sebagai Fondasi Kesejahteraan Jangka Panjang

Kesejahteraan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya melalui redistribusi apabila produktivitas stagnan. Dalam jangka panjang, kenaikan upah riil, penerimaan pajak, kualitas layanan publik, dan kemampuan membiayai perlindungan sosial sangat bergantung pada kemampuan ekonomi menghasilkan nilai lebih besar dengan sumber daya yang tersedia. Karena itu, agenda keadilan perlu bersanding dengan agenda produktivitas. Pertanyaannya bukan apakah harus memilih efisiensi atau keadilan, melainkan bagaimana meningkatkan produktivitas dengan cara yang memperluas, bukan mempersempit, distribusi manfaat.

Produktivitas di Indonesia dapat ditingkatkan melalui beberapa jalur: kualitas pendidikan, adopsi teknologi, infrastruktur logistik, perbaikan manajemen, kompetisi yang sehat, formalitas usaha, riset dan inovasi, serta pergeseran tenaga kerja menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi. Banyak usaha kecil memiliki produktivitas rendah bukan karena pekerjanya tidak bekerja keras, tetapi karena mesin, akses pasar, manajemen, dan modal terbatas. Program produktivitas harus membantu memperbaiki faktor-faktor tersebut. Di perusahaan besar, peningkatan produktivitas seharusnya diikuti mekanisme yang memastikan pekerja ikut menikmati hasil melalui upah, bonus, pengembangan karier, atau peningkatan kualitas kerja.

Kompetisi yang sehat sangat penting. Pasar yang terlalu terkonsentrasi dapat membuat kenaikan produktivitas tidak diteruskan menjadi harga lebih rendah atau upah lebih tinggi. Kebijakan persaingan,

interoperabilitas digital, perlindungan konsumen, dan pencegahan praktik eksklusif mendukung distribusi manfaat inovasi. Di sisi lain, perusahaan memerlukan kepastian regulasi agar berani berinvestasi. Tata kelola yang baik harus mampu membedakan antara regulasi yang melindungi kepentingan publik dan regulasi yang sekadar menambah biaya administratif tanpa hasil yang jelas.

Produktivitas sektor publik juga sama pentingnya. Digitalisasi layanan, simplifikasi proses, interoperabilitas data, dan pengadaan modern dapat mengurangi biaya administrasi. Namun digitalisasi harus mengubah proses, bukan hanya memindahkan formulir kertas ke layar. Pemerintah yang lebih produktif dapat memberikan layanan lebih baik dengan sumber daya yang sama, sehingga ruang fiskal untuk program prioritas meningkat. Pada titik inilah agenda reformasi birokrasi bertemu langsung dengan agenda kesejahteraan.

27. Narasi Pembangunan: Dari Angka Makro menuju Harapan Kolektif

Kebijakan ekonomi tidak bekerja hanya melalui insentif material; ia juga bekerja melalui harapan dan kepercayaan. Rumah tangga memutuskan apakah akan membeli rumah, melanjutkan pendidikan, membuka usaha, atau menabung berdasarkan persepsi mengenai masa depan. Perusahaan memutuskan investasi berdasarkan ekspektasi permintaan, stabilitas regulasi, dan kualitas institusi. Karena itu, pemerintah perlu memiliki narasi pembangunan yang kredibel: bukan optimisme berlebihan, tetapi penjelasan yang konsisten mengenai arah ekonomi, prioritas, risiko, dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi.

Narasi yang terlalu berpusat pada angka pertumbuhan dapat terasa jauh dari pengalaman warga. Sebaliknya, narasi kesejahteraan menghubungkan indikator makro dengan kehidupan: pertumbuhan harus berarti peluang kerja; investasi harus berarti keterampilan dan usaha lokal; fiskal harus berarti sekolah dan layanan kesehatan yang lebih baik; digitalisasi harus berarti akses dan produktivitas; transisi hijau harus berarti lingkungan lebih aman dan pekerjaan baru. Hubungan semacam ini membantu masyarakat memahami mengapa kebijakan tertentu dilakukan dan bagaimana hasilnya akan dinilai.

Komunikasi juga penting ketika pemerintah harus mengambil keputusan sulit. Reformasi subsidi, penyesuaian tarif, atau perubahan pajak dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Kepercayaan lebih mungkin terjaga jika pemerintah menjelaskan siapa yang terdampak, mengapa kebijakan diperlukan, kompensasi apa yang tersedia, dan indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan. Transparansi mengenai ketidakpastian justru dapat lebih kredibel daripada klaim bahwa seluruh kebijakan pasti berhasil.

Pada akhirnya, pemulihan berkeadilan membutuhkan harapan kolektif bahwa kemajuan ekonomi dapat dirasakan lintas kelompok dan generasi. Harapan tersebut tidak lahir dari slogan, melainkan dari pengalaman berulang bahwa institusi bekerja, pelayanan membaik, kesempatan terbuka, dan aturan berlaku secara fair. Ketika warga melihat hubungan nyata antara kontribusi mereka dan kemajuan bersama, modal sosial meningkat. Modal sosial inilah yang membuat reformasi lebih mudah, investasi lebih berani, dan masyarakat lebih tangguh menghadapi guncangan.

28. Peta Jalan Implementasi 2026-2030

Agar gagasan pemulihan berkeadilan tidak berhenti pada prinsip normatif, diperlukan peta jalan implementasi yang mempunyai urutan, indikator, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi. Tahap pertama, yang dapat dijalankan segera, adalah memperkuat fondasi data dan perlindungan. Pemerintah perlu memastikan data sosial-ekonomi mutakhir, memperbaiki mekanisme pengaduan, memperluas interoperabilitas layanan, dan menyiapkan protokol respons terhadap guncangan. Pada tahap ini, perhatian utama adalah memastikan bahwa rumah tangga rentan tidak jatuh lebih dalam ketika mengalami kehilangan pendapatan, kenaikan harga, bencana, atau gangguan kesehatan.

Tahap kedua adalah mempercepat penciptaan kerja dan produktivitas. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun peta kebutuhan keterampilan berdasarkan investasi dan perubahan struktur industri. Program pelatihan, apprenticeship, sertifikasi, dan layanan penempatan kerja kemudian diarahkan kepada kebutuhan tersebut. Insentif investasi dapat diprioritaskan pada proyek yang memiliki employment multiplier tinggi, linkage dengan pemasok lokal, transfer teknologi, dan kepatuhan sosial-lingkungan. Pada saat yang sama, UMKM perlu memperoleh dukungan untuk meningkatkan produktivitas, bukan sekadar bertahan hidup.

Tahap ketiga adalah memperkuat universal basic services. Kualitas sekolah, layanan kesehatan primer, air bersih, sanitasi, transportasi publik, dan konektivitas digital perlu dijadikan fondasi kesempatan yang setara. Pemerataan layanan harus diukur melalui standar minimum yang sama, tetapi cara mencapainya dapat berbeda menurut karakter wilayah. Di daerah kepulauan, misalnya, kombinasi telemedicine, layanan bergerak, transportasi laut, dan insentif tenaga kesehatan mungkin lebih efektif dibanding model fasilitas yang sama persis dengan kota besar.

Tahap keempat adalah transformasi struktural. Indonesia perlu memanfaatkan transisi energi, digitalisasi, AI, hilirisasi, dan bioekonomi untuk membangun sektor bernilai tambah tinggi. Namun setiap strategi transformasi harus memiliki social compact: siapa yang dilatih, bagaimana pekerja terdampak dilindungi, bagaimana manfaat dibagi dengan daerah, bagaimana lingkungan dipulihkan, dan bagaimana UMKM masuk ke rantai nilai. Dengan demikian, industrial policy tidak hanya berorientasi pada produksi dan ekspor, tetapi juga pada pembentukan kemampuan nasional.

Tahap kelima adalah institusionalisasi pengukuran kesejahteraan. Pemerintah dapat mengembangkan laporan tahunan "Kesejahteraan dan Ketahanan Ekonomi" yang berdampingan dengan laporan makro dan fiskal. Dashboard nasional dan daerah memuat pendapatan median, upah riil, kualitas pekerjaan, kemiskinan multidimensi, mobilitas sosial, akses layanan, ketahanan lingkungan, dan kepercayaan publik. Target-target tersebut kemudian digunakan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Dengan cara ini, orientasi kesejahteraan tidak bergantung pada preferensi pemerintah tertentu, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola pembangunan.

Peta jalan juga harus menggunakan prinsip adaptive management. Tidak semua kebijakan akan bekerja sesuai rencana, terutama dalam lingkungan yang berubah cepat. Karena itu, program besar perlu memiliki mekanisme pilot, evaluasi, umpan balik, dan penyesuaian. Kegagalan yang terdeteksi dini dan diperbaiki merupakan bagian dari pembelajaran; yang harus dihindari adalah mempertahankan program yang tidak efektif hanya karena alasan administratif atau politik. Negara yang mampu belajar akan lebih tangguh daripada negara yang hanya mampu merencanakan.

29. Penutup: Menjadikan Keadilan sebagai Infrastruktur Pemulihan

Pemulihan ekonomi yang berkeadilan berangkat dari pemahaman sederhana tetapi mendasar: ekonomi ada untuk melayani manusia. PDB, investasi, produktivitas, ekspor, dan penerimaan negara penting karena menyediakan kapasitas untuk meningkatkan kehidupan, bukan karena angka-angka tersebut merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Ketika kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai tujuan utama, kebijakan ekonomi menjadi lebih terarah: pertumbuhan harus menciptakan pekerjaan layak; fiskal harus melindungi dan membangun kapasitas; teknologi harus memperluas kesempatan; dan transisi hijau harus melindungi mereka yang menanggung biaya perubahan.

Indonesia memiliki modal yang kuat: pasar domestik besar, populasi produktif, sumber daya alam, ekonomi digital yang berkembang, demokrasi, dan kapasitas institusi yang terus membaik. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi kesejahteraan yang lebih merata. Angka pertumbuhan 2026 yang tetap kuat dan penurunan kemiskinan menunjukkan momentum positif. Namun momentum hanya akan menjadi transformasi jika disertai peningkatan kualitas pekerjaan, akses layanan, produktivitas UMKM, perlindungan sosial, pemerataan wilayah, dan pembangunan manusia.

Keadilan bukan lawan dari efisiensi. Ketimpangan yang ekstrem, kesehatan buruk, pendidikan rendah, pekerjaan rentan, dan ketidakpercayaan sosial justru menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki perlindungan minimum, dan percaya bahwa sistem memberi kesempatan yang adil cenderung lebih mampu berinvestasi, berinovasi, mengambil risiko kewirausahaan, dan beradaptasi terhadap perubahan.

Karena itu, pertanyaan kebijakan yang paling penting bukan hanya "berapa cepat ekonomi tumbuh?", tetapi "untuk siapa ekonomi tumbuh, bagaimana manfaat dibagi, risiko ditanggung oleh siapa, dan kemampuan apa yang diperoleh masyarakat dari pertumbuhan tersebut?" Pemulihan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan lebih dari sekadar pemulihan statistik. Ia menjadi proyek pembangunan manusia: membangun ekonomi yang tangguh, produktif, inklusif, dan bermartabat. Pada akhirnya, ukuran tertinggi keberhasilan bukanlah besar kecilnya angka makroekonomi, melainkan semakin banyak warga yang mampu menjalani kehidupan yang sehat, aman, produktif, bebas dari kemiskinan, dan memiliki harapan yang rasional terhadap masa depan.

Perspektif ini sekaligus mengingatkan bahwa keadilan bukan sebuah titik akhir yang dapat dicapai sekali untuk selamanya. Struktur ekonomi, teknologi, demografi, dan risiko global terus berubah. Kebijakan yang adil pada satu periode dapat menjadi tidak memadai pada periode berikutnya. Oleh sebab itu, orientasi kesejahteraan harus menjadi prinsip yang terus diuji melalui data dan pengalaman masyarakat. Ketika pekerjaan baru muncul, sistem perlindungan harus menyesuaikan; ketika teknologi berkembang, pendidikan harus berubah; ketika pola iklim bergeser, strategi pangan dan infrastruktur harus diperbarui; dan ketika kapasitas fiskal meningkat, kualitas layanan publik harus ikut naik. Dengan logika tersebut, pembangunan menjadi proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Negara tidak hanya mengelola anggaran dan regulasi, tetapi memfasilitasi masyarakat untuk memperluas kapabilitas, membangun ketahanan, dan menciptakan nilai bersama. Itulah esensi pemulihan ekonomi yang berkeadilan: bukan sekadar kembali tumbuh, melainkan tumbuh dengan arah yang jelas—menuju masyarakat yang lebih sejahtera, lebih setara dalam kesempatan, lebih tangguh menghadapi guncangan, serta lebih percaya bahwa kemajuan ekonomi nasional memiliki arti nyata bagi kehidupan setiap warga.

Matriks Kebijakan Ringkas

Bidang	Tujuan Kesejahteraan	Instrumen Kunci	Indikator Hasil
Pekerjaan	Pekerjaan formal dan produktif	Pelatihan berbasis permintaan, apprenticeship, insentif investasi berkualitas	Upah riil, formalitas, jaminan sosial, underemployment
Perlindungan sosial	Ketahanan terhadap shock	Registry dinamis, bantuan adaptif, portabilitas jaminan	Waktu respons, coverage, exclusion error
UMKM	Kenaikan produktivitas	Supplier development, pembiayaan kontraktual, digitalisasi	Produktivitas, omzet, tenaga kerja formal
Pendidikan-kesehatan	Kapabilitas manusia	Learning outcomes, layanan primer, gizi, reskilling	Hasil belajar, akses, kesehatan, employability
Wilayah	Pemerataan kesempatan	Logistik, broadband, kota menengah, transfer berbasis kebutuhan	Biaya logistik, akses layanan, PDRB per kapita
Digital-AI	Produktivitas inklusif	Konektivitas, literasi AI, tata kelola algoritma	Adopsi UMKM, skill, insiden bias/keamanan
Hijau	Ketahanan ekologis	Energi bersih, reskilling, diversifikasi daerah	Green jobs, emisi, resilience

Glossarium

Capability approach: Pendekatan pembangunan yang menilai kesejahteraan dari kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai, bukan semata dari pendapatan atau kepemilikan barang.

Decent work: Pekerjaan produktif yang memberikan pendapatan layak, hak kerja, perlindungan sosial, keamanan, dan ruang dialog sosial.

Distributional impact assessment: Analisis mengenai bagaimana suatu kebijakan memengaruhi kelompok pendapatan, wilayah, gender, usia, atau kelompok sosial yang berbeda.

Formalitas kerja: Status pekerjaan yang berada dalam hubungan kerja dan kerangka regulasi formal, biasanya terkait kontrak, pencatatan, pajak, dan jaminan sosial.

Gini ratio: Indikator ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran; semakin mendekati 1 berarti ketimpangan lebih tinggi.

Growth incidence: Pola pembagian manfaat pertumbuhan ekonomi di antara kelompok masyarakat atau kelompok pendapatan.

Inclusive growth: Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kesempatan luas dan memungkinkan manfaat pembangunan dinikmati berbagai kelompok masyarakat.

Just transition: Proses transisi menuju ekonomi hijau atau rendah karbon yang sekaligus melindungi pekerja, komunitas, dan wilayah yang terdampak.

Kemiskinan multidimensi: Kemiskinan yang diukur melalui berbagai kekurangan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, dan standar hidup, bukan hanya pendapatan.

Near-poor: Kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan jatuh miskin akibat guncangan.

Predistribution: Kebijakan yang membentuk pembagian pendapatan dan nilai tambah sejak proses produksi, sebelum redistribusi melalui pajak dan transfer.

Redistribution: Kebijakan yang mengubah distribusi pendapatan setelah terbentuk, terutama melalui pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik.

Reskilling: Pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru agar seseorang dapat beralih ke pekerjaan atau fungsi yang berbeda.

Social protection: Sistem bantuan sosial, jaminan sosial, dan kebijakan pasar kerja yang melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial.

Spending better: Prinsip meningkatkan kualitas belanja publik dengan menekankan hasil, efektivitas, efisiensi, dan dampak kesejahteraan.

Underemployment: Kondisi ketika seseorang bekerja tetapi jam kerja atau pemanfaatan keterampilannya lebih rendah daripada yang diinginkan atau dibutuhkan.

Upskilling: Peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pekerjaan yang sama atau yang berdekatan.

Universal basic services: Penyediaan layanan dasar yang dapat diakses secara luas, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi publik, dan konektivitas.

Welfare dashboard: Kumpulan indikator multidimensi untuk menilai kesejahteraan, melengkapi ukuran agregat seperti PDB.

Whole-of-government: Pendekatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan tingkat pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama secara terpadu.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188–2244. <https://doi.org/10.1086/705716>
- Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Badan Pusat Statistik. (2026a, August 5). Indonesia's economic in Q2-2026 was 5.29 percent (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b, August 5). In March 2026, the percentage of the poor population decreased to 8.07 percent. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c, August 5). Unemployment rate was 4.65 percent; the average wage of employees was 3.39 million rupiah. BPS-Statistics Indonesia.

- Badan Pusat Statistik. (2026d, February 5). Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent. BPS-Statistics Indonesia.
- Berg, A., Ostry, J. D., Tsangarides, C. G., & Yakhshilikhov, Y. (2018). Redistribution, inequality, and growth: New evidence. *Journal of Economic Growth*, 23(3), 259–305.
<https://doi.org/10.1007/s10887-017-9150-2>
- International Labour Organization. (2025). Indonesia endorses National Roadmap for Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions. ILO.
- International Labour Organization. (2026). Realizing decent work in the platform economy. International Labour Conference, 114th Session.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, July 21). APBN Semester I 2026 tetap kuat. Kementerian Keuangan RI.
- Mazzucato, M., & Ryan-Collins, J. (2022). Putting value creation back into 'public value': From market-fixing to market-shaping. *Journal of Economic Policy Reform*, 25(4), 345–360.
<https://doi.org/10.1080/17487870.2022.2053537>
- Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). Redistribution, inequality, and growth. IMF Staff Discussion Note SDN/14/02. International Monetary Fund.
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Rodrik, D. (2014). Green industrial policy. *Oxford Review of Economic Policy*, 30(3), 469–491.
<https://doi.org/10.1093/oxrep/gru025>
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- World Bank. (2025). Indonesia Economic Prospects, December 2025. World Bank.